

TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA

Emon Wirawan Harefa¹

¹Universitas Kristen Indonesia

emonwirawan04@gmail.com

The Level of Community Participation in Village Fund Management

Abstract: Community participation is vital for village development, especially in managing village funds. However, in Klapanunggal Village, the implementation of fund management still struggles to meet community needs due to insufficient involvement. This study aims to explore community participation in fund management and identify factors affecting it. Qualitative research methods were used, highlighting the importance of community involvement in public policy decisions. Despite government efforts to enhance participation, it remains low. While the community acknowledges the importance of involvement, their participation in implementation, evaluation, and benefit-taking processes remains limited, with minimal impact on daily life.

Keywords: Community Participation, Village Funds, Policy Program Outcomes.

Abstrak: Partisipasi masyarakat adalah sumber modal yang sangat penting untuk pembangunan desa, terutama dalam pengelolaan dana desa. Namun, di Desa Klapanunggal, implementasi pengelolaan dana masih kesulitan memenuhi kebutuhan masyarakat karena keterlibatan yang kurang memadai. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Metode penelitian kualitatif digunakan, menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam keputusan kebijakan publik. Meskipun pemerintah berupaya meningkatkan partisipasi, namun tetap rendah. Meskipun masyarakat menyadari pentingnya keterlibatan, partisipasi mereka dalam proses implementasi, evaluasi, dan pengambilan manfaat tetap terbatas, dengan dampak yang minimal pada kehidupan sehari-hari masyarakat desa.

Kata kunci: Partisipasi Masyarakat, Dana Desa, Program Kebijakan.

PENDAHULUAN

Sistem demokrasi memberikan hak dan kebebasan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Prinsip dasar demokrasi adalah hak rakyat menentukan nasib sendiri. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan diharapkan menghasilkan kebijakan pembangunan yang adil, membangun kepercayaan publik, meningkatkan sinergi antara masyarakat dan pemerintah. Strategi perencanaan mencakup pemerintahan yang baik, partisipasi, dan akuntabilitas.

Partisipasi masyarakat dalam evaluasi fokus pada evaluasi kinerja pemerintah atau kebijakan, termasuk penilaian dampak proyek terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi. Tujuannya adalah memastikan bahwa pembangunan sesuai rencana, transparan, melibatkan partisipasi publik, dan bertanggung jawab. Partisipasi aktif masyarakat diharapkan pada tahap distribusi manfaat pembangunan untuk mengurangi kesenjangan, memperkuat hubungan antara masyarakat dan pemerintah, dan meningkatkan dampak positif bagi semua.

Pemerintah Desa Klapanunggal bertanggung jawab untuk mencapai tujuan yang disetujui oleh masyarakat melalui kebijakan publik dan pelayanan publik. Keterlibatan masyarakat penting dalam menyusun program kebijakan untuk memahami kebutuhan masyarakat. Implementasi program kebijakan membutuhkan pemahaman instruksi program dan

regulasi untuk memastikan konsistensi, efisiensi, dan efektivitas pembangunan.

Kebijakan yang diputuskan melalui musyawarah membutuhkan regulasi pada tahap implementasi untuk memastikan kebijakan dapat diimplementasikan sesuai kebutuhan dan melindungi kepentingan masyarakat. Regulasi berperan melindungi kepentingan masyarakat, meningkatkan keselamatan, memastikan kepatuhan terhadap standar, dan menciptakan lingkungan yang adil dan sehat bagi semua pemangku kepentingan.

Rumusan masalahnya dalam penelitian Partisipasi masyarakat adalah sumber modal penting untuk pembangunan desa, terutama melalui pengelolaan dana desa. Transparansi dan partisipasi dalam pengelolaan dana desa penting untuk keberhasilan implementasi program kebijakan. Sayangnya, di Desa Klapanunggal, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan minimnya pengetahuan tentang peran mereka dalam pengelolaan dana desa menyebabkan kebutuhan pokok masyarakat tidak terpenuhi dengan baik. Proses pelaksanaan dana desa di Desa Klapanunggal belum sepenuhnya melibatkan masyarakat, terutama karena rendahnya tingkat pendidikan dan kemampuan mereka dalam pengelolaan dana desa. Minimnya informasi dari pemerintah desa juga menjadi hambatan, menyebabkan kekhawatiran bahwa alokasi uang desa tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat. Keterlibatan publik dianggap penting, sejalan dengan prinsip

demokrasi dan tata kelola yang memungkinkan partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan.

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan program kebijakan berdampak negatif, seperti kurangnya representasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Hal ini menyebabkan pembangunan desa tidak memperhitungkan aspek keberlanjutan lingkungan, sosial, ekonomi, dan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi masyarakat dianggap kunci untuk mencapai pembangunan desa yang berkelanjutan.

Penelitian ini diharapkan agar sekiranya dijadikan sebagai panduan evaluasi bagi masyarakat desa lainnya dalam hal meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini dapat menjadi rujukan bacaan bagi masyarakat pada umumnya yang ingin mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

Teori partisipasi merupakan tindakan atau proses di mana individu atau kelompok turut serta dalam kegiatan, pengambilan keputusan, atau aktivitas tertentu, dengan tingkat partisipasi bervariasi dari aktif hingga sederhana. Partisipasi mencakup berbagai konteks seperti politik, sosial, ekonomi, atau budaya, dan menjadi cara penting untuk memengaruhi perubahan dan menyuarakan pandangan dalam masyarakat. Cohen dan Uphoff (1977) membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu partisipasi dalam pengambilan

keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi. Partisipasi dalam pengambilan keputusan melibatkan kontribusi ide dan tanggapan terhadap program. Partisipasi dalam pelaksanaan melibatkan penggerakan sumber daya dan administrasi program. Partisipasi dalam pengambilan manfaat terkait dengan distribusi hasil pembangunan yang dinikmati masyarakat. Partisipasi dalam evaluasi bertujuan untuk memberikan umpan balik dan masukan perbaikan dalam pelaksanaan program atau kegiatan selanjutnya.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang fakta, realita, masalah, gejala, dan peristiwa yang penulis teliti dengan mempelajarinya secara menyeluruh. Keunggulan pendekatan ini terletak pada kemampuannya untuk menyediakan pemahaman yang mendalam, tidak terbatas pada pemahaman permukaan. Dalam konteks penelitian mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa, pendekatan kualitatif dipilih sebagai metode sosiologis yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk menampilkan situasi temuan di lapangan. Pendekatan ini sesuai dengan pandangan Thomas bahwa jika suatu situasi didefinisikan sebagai nyata oleh seseorang, maka situasi tersebut dianggap nyata dalam konsekuensinya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus untuk memahami secara komprehensif suatu permasalahan atau peristiwa tertentu. Studi kasus, menurut Mudjia Rahardjo, adalah serangkaian tindakan ilmiah yang mempelajari peristiwa, program, atau aktivitas secara menyeluruh dan mendalam, baik pada tingkat individu, kelompok, lembaga, atau organisasi, dengan tujuan memperoleh pemahaman yang lebih baik. Fokus studi kasus adalah hal-hal yang nyata dan unik. Dalam konteks penelitian ini, studi kasus digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang partisipasi masyarakat Desa Klapanunggal dalam pengelolaan anggaran. Secara sosial, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi mereka dalam pengelolaan dana desa.

Teknik pengumpulan data menurut Suharsimi Arikunto, data adalah hasil pencatatan peneliti yang terdiri dari fakta dan angka, yang dapat digunakan untuk membuat informasi. Informasi, di sisi lain adalah hasil pengolahan data yang digunakan untuk tujuan tertentu. Pengumpulan data merupakan tahap penting dalam penelitian, dilakukan untuk memperoleh alat dan pengetahuan yang diperlukan dalam mengumpulkan data dari subjek penelitian. Data sendiri adalah kumpulan fakta atau informasi yang dapat diukur atau dihitung, biasanya direpresentasikan dalam bentuk angka, teks, atau bentuk lainnya.

HASIL PENELITIAN

Pentingnya tingkatan partisipasi masyarakat dalam program kebijakan dana desa sebagai kunci untuk mencapai pembangunan yang merata dan sejahtera di seluruh Indonesia. Tingkat partisipasi masyarakat mencakup berbagai bentuk, seperti partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam evaluasi, dan partisipasi dalam pengambilan manfaat.

Pentingnya partisipasi ini terlihat dalam konteks demokrasi politik, di mana kebebasan berpendapat dan kebebasan berkerja memainkan peran kunci.

Meskipun demikian, masih terdapat masalah seperti penyelewengan dana desa dan kurangnya kebijakan program pembangunan yang menjawab permasalahan masyarakat desa secara umum. Partisipatif masyarakat diharapkan dapat mengatasi masalah ini dengan memperbolehkan masyarakat terlibat dalam proses pembangunan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan.

Pembangunan pedesaan diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan, namun masih dihadapi sejumlah masalah, seperti tingkat pendidikan rendah, rendahnya pemanfaatan sumber daya alam, dan tingkat kemiskinan yang tinggi. Suksesnya program pembangunan pedesaan sangat tergantung pada partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi

Tingkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa untuk program kebijakan

pembangunan desa memerlukan faktor-faktor pendukung yang melibatkan kesadaran masyarakat dan kesempatan partisipasi. Kesadaran masyarakat terhadap peran mereka ditingkatkan melalui sosialisasi, pelatihan, dan komunikasi efektif. Kesempatan partisipasi masyarakat tercermin dalam penyelenggaraan forum diskusi antara warga desa dan perangkat desa, serta keinginan aktif masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa. Faktor-faktor ini dianggap kunci untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan program pembangunan di desa.

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa memerlukan penanganan terhadap faktor penghambat. Faktor-faktor tersebut meliputi: Hambatan Kultural: Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dapat membuat mereka kurang tanggap terhadap program pengelolaan dana desa karena kurangnya pengetahuan. Pendidikan rendah di desa dapat menjadi penghambat untuk mengoptimalkan pengembangan wilayah.

Kendala dalam Pencairan Dana Desa dan Struktur: Struktur politik dan birokrasi pemerintah pusat dapat membuat kebijakan pencairan dana desa dilakukan secara bertahap. Ini dapat membuat masyarakat tidak siap untuk berpartisipasi dalam proyek pembangunan berulang karena menunggu proses pencairan dana desa.

Hambatan Komunikasi Teknis:

Kurangnya komunikasi antara pemerintah desa, lembaga masyarakat, dan masyarakat desa menyebabkan hambatan teknis. Perselisihan dalam musyawarah desa muncul karena perbedaan pendapat tentang pengelolaan dana desa untuk pembangunan jangka panjang dan pemberdayaan masyarakat. Beberapa masyarakat ingin fokus pada pembangunan infrastruktur fisik, sementara yang lain ingin meningkatkan pendapatan desa melalui pemberdayaan ekonomi.

Dalam merumuskan kebijakan, pemerintah perlu mendengarkan aspirasi masyarakat sebagai masukan dan pertimbangan. Pemerintah desa harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan memiliki suara dalam kebijakan terkait pengelolaan dana desa. Setiap warga memiliki hak dan ruang untuk menyampaikan aspirasinya selama pemerintahan desa, terutama dalam alokasi dana desa. Pemerintah seharusnya menyerap aspirasi masyarakat sebagai dasar untuk mengambil kebijakan yang mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Klapanunggal

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan bukan lagi sebuah kewajiban, tetapi hak mereka. Masyarakat memiliki pengetahuan tentang kebutuhan dan masalah di wilayah mereka, dan mereka berhak memilih cara pelaksanaan kegiatan pembangunan. Dalam pelaksanaan program kebijakan, partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dianggap sebagai prinsip dasar warga negara,

yang memiliki hak untuk menyuarakan pendapat dan berpartisipasi langsung sesuai kepentingannya. Keterlibatan dimulai dari memberikan gagasan, ide, saran, atau masukan yang membangun dan menguntungkan bagi masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam program pembangunan pada tingkatan ini dapat dikategorikan sebagai manipulasi, di mana tingkat partisipasinya sangat rendah. Pemerintah membuat program pembangunan dan membentuk komite atau badan penasehat untuk mendukungnya, sehingga tercipta kesan bahwa masyarakat sangat membutuhkan program tersebut. Pada tingkatan ini, partisipasi masyarakat hanya digunakan oleh pemerintah tanpa memberikan peran yang signifikan kepada mereka, dan dampak pembangunan tidak begitu berpengaruh pada perubahan kehidupan masyarakat desa. Masyarakat hanya terlibat dalam pelaksanaan pembangunan, sedangkan dalam pengambilan keputusan, evaluasi, dan manfaat dari program, keterlibatan masyarakat masih sangat kurang sesuai dengan harapan mereka.

Dalam kegiatan penanggulangan stunting, tingkat partisipasi masyarakat dapat diklasifikasikan sebagai "Informasi" di mana warga negara dapat mendengar dan didengar, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk memastikan bahwa pandangan mereka akan diperhatikan oleh pemerintah. Pada tingkatan ini, pemerintah menerapkan program penanggulangan stunting tanpa melibatkan masyarakat dalam pengambilan

keputusan terkait kebijakan. Masyarakat hanya terlibat dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa.

Dalam program ketahanan pangan, tingkat partisipasi masyarakat tergolong dalam perujukan (Placation), di mana pemerintah memungkinkan masyarakat untuk menyuarakan pendapat mereka, tetapi orang-orang yang memegang kekuasaan tetap memiliki kendali keputusan. Meskipun masyarakat terlibat dalam tahapan pengambilan keputusan, keterbatasan pendidikan menyebabkan keterlibatan mereka menjadi kurang signifikan dalam program tersebut.

Program pemerintahan desa Klapanunggal yang berfokus pada pembaruan SDGs bertujuan menciptakan desa yang lebih baik dan berkelanjutan. Namun, partisipasi masyarakat dalam program ini minim karena kurangnya informasi yang diterima dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi. Partisipasi masyarakat berada pada tingkat konsultasi, di mana pemerintah memberikan informasi dan meminta pendapat masyarakat. Meskipun ada upaya untuk melibatkan masyarakat, tingkat partisipasi dianggap sebagai batas legal untuk partisipasi penuh, dan komunikasi tetap terbatas. Pertemuan tetangga, permintaan pendapat publik, dan survei adalah beberapa bentuk konsultasi, tetapi partisipasi masih dianggap sebagai ritualistik.

Dalam program Desa Aman Siaga, tingkat partisipasi masyarakat tergolong dalam "Terapi",

di mana pemerintah membuat program dengan tujuan mengubah pola pikir masyarakat. Partisipasi masyarakat hanya terbatas pada pelaksanaan dan evaluasi program, sementara dalam pengambilan keputusan, masyarakat desa tidak terlibat karena program ini berasal dari pemerintah pusat ke pemerintah desa. Meskipun tujuan program ini positif untuk membantu masyarakat dengan masalah ekonomi dan lainnya, partisipasi masyarakat lebih bersifat eksekusi daripada kontribusi dalam proses kebijakan.

Partisipasi yang rendah dalam pengelolaan dana desa dapat menghambat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas. Faktor-faktor seperti kurangnya kesadaran, akses informasi yang terbatas, dan kurangnya keinginan untuk berpartisipasi dapat menjadi penyebabnya. Masyarakat perlu diberdayakan untuk menyadari peran mereka dalam mengelola dana desa, dan mereka harus memiliki akses dan terlibat dalam pengambilan keputusan terkait dana desa.

Nonpartisipasi, atau ketidakpartisipan, mengacu pada individu atau kelompok yang tidak terlibat dalam proses partisipasi sosial, politik, atau ekonomi dalam masyarakat. Ini dapat disebabkan oleh ketidakminatan, apatis, ketidakpuasan terhadap sistem politik atau ekonomi, hambatan fisik atau sosial, atau ketidakmampuan karena masalah kesehatan atau ekonomi. Nonpartisipasi dapat berdampak negatif pada demokrasi, menurunkan keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan, dan meningkatkan ketidaksetaraan. Penting untuk memahami dan

mengatasi nonpartisipasi untuk memperkuat demokrasi dan inklusivitas sosial serta mendorong partisipasi yang lebih luas dalam masyarakat.

Anggaran Dana Desa Klapanunggal Tahun 2022

Berdasarkan penetapan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kebijakan terkait dana desa adalah salah satu kebijakan yang mendasari UU Nomor 6 Tahun 2014. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dana desa ini diberikan kepada desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, penegakan hukum, dan pembangunan.

Anggaran dana desa klapanunggal tahun 2022 senilai Rp 1.190.804.400 yang diperuntukan untuk membiayai kegiatan program kebijakan yang telah di susun oleh pemerintah dan diputuskan bersama-sama dengan masyarakat. Perihal anggarannya dialokasikan untuk membiayai berbagai program-program kebijakan di desa klapanunggal. Adapun beberapa yang menjadi program kebijakan beserta besaran anggaran yang dipergunakan:

1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, jenis kegiatan Update Sustainable Development Goals (SDGs). Anggaran Rp. 10.000.000.
2. Bidang pelaksanaan pembangunan desa, dengan melakukan Pengaspalan jalan Kp.

- Sindanglengo RT.06/RW.04. Anggaran Rp. 63.432.000, Pengaspalan jalan Kp. Cibugis RT.001/RW.005. Anggaran Rp. 52.000.000, Pengaspalan jalan Kp. Rawasinga RT.007/RW.002. Anggaran RP. 175.000.000, Kegiatan stanting dengan anggaran Rp. 5.000.000, dan Operasional Rumah Desa Sehat (RDS) dengan anggaran Rp. 15.000.000.
3. Bidang pembinaan kemasyarakatan desa, dengan jenis kegiatan Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM), anggaran Rp. 15.000.000, Operasional (KPM), dengan anggaran Rp. 3.000.000
 4. Bidang pemberdayaan masyarakat. Jenis kegiatan Ketahanan pangan Padat Karya tunai Desa (PKTD), anggaran Rp. 238.200.000, Pelatihan peningkatan bagi kepala desa dan perangkat desa Rp. 20.000.000, Kegiatan pelatihan linmas Rp. 12.500.000.
 5. Bidang tak terduga. Kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT), anggaran Rp.478.800.000. Operasional kegiatan (BPD) Rp. 7.572.000, Desa aman siaga (PPKM) Rp. 95.300.000.

PEMBAHASAN

Desa Klapanunggal terletak di Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor. Secara astronomis, Desa Klapanunggal terletak antara 6o 32'13" Lintang Selatan dan 106o 94'58" Bujur Timur. Posisi lintangnya membuatnya memiliki

iklim tropis, dan posisi bujurnya membuatnya berada di bagian barat Indonesia. Jarak Desa Klapanunggal Dengan kecamatan klapanunggal mencapai 3 Km, wilayah Desa Klapanunggal memiliki luas 958,5 Ha. Secara batas wilayah Desa Klapanunggal berbatasan dengan Desa Kali Cilengsi Dayeh di sebelah utara, Desa Lulut Lw Karet di sebelah selatan, di sebelah timur berbatasan dengan Desa Cikahuripan, dan untuk sebelah barat berbatasan dengan Desa Kekuning Nambo berdasarkan profil Desa Klapanunggal Tahun 2022.

Berdasarkan data informasi yang didapatkan dari data kependudukan Desa Klapanunggal tahun 2022 mencapai angka 21.043 jiwa yang terbagi atas penduduk laki-laki dan perempuan pada usia muda sampai usia tua. Persentase jumlah jenis kelamin laki-laki 10.553 jiwa sedangkan kelamin perempuan berjumlah 10.490. Kalau kita simpulkan berdasarkan jenis kelamin mungkin laki-laki sedikit dominan dari pada perempuan. Tersajikan juga data tentang usia penduduk mulai dari umur 0-70 Tahun. Kalau berdasarkan presentase umur 20-24 Tahun sedikit melebihi dengan jumlah presentase 15,29%, kemudian disusul dengan umur 15-19 Tahun dengan presentase 14,02%, dan umur 25-29 Tahun jumlah presentase 13,66%.

Berdasarkan usia produktif yang penulis evaluasi seharusnya ada sebanyak 11.844 orang masyarakat yang bisa ikut terlibat dalam pengelolaan dana desa. Usia produktif ini yang mulai dihitung dari umur 20-60 tahun, dari total 21.043 keseluruhan jiwa penduduk Desa

Klapanunggal. Faktor minimnya pengetahuan dan keahlian yang dimiliki oleh masyarakat dalam mengelola dana desa kurangnya ketidak mampuan masyarakat membuat mereka ketinggalan dalam mengimplementasikan pengelolaan dana desa dalam bidang proyek pembangunan.

Peningkatan SDM melalui pendidikan mengacu pada potensi dan kemampuan individu pada setiap anggota masyarakat. Pendidikan berperan penting dalam membentuk dan mengembangkan potensi individu, mengajar keterampilan praktis, dan memfasilitasi pemahaman dunia dan hubungan sosial. Pentingnya pendidikan sebagai sumber daya manusia di desa terletak pada kemampuan individu untuk menyumbangkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman. Berdasarkan jumlah penduduk Desa Klapanunggal tahun 2022 ada sebanyak 21.043 jiwa Masyarakat, yang dimana rata-rata tingkat pendidikan masyarakat hanya tamatan SMA/SMK dengan jumlah 9.721 jiwa. Berdasarkan jumlah representasi Pendidikan Masyarakat yang dimana masih banyak yang hanya lulusan dari SMA/SMK, sehingga hal ini menjadi penyebab kemampuan masyarakatnya masih dibawah rata-rata, dan sebanyak 11.037 masyarakat hanya sampai pada tingkat pendidikan SD-SMP. Minimnya ketidaktahuan masyarakat tentang pentingnya peran serta mereka untuk terlibat dalam proses pengelolaan dana desa menjadi dampak buruk bagi perkembangan desa. Dalam hal ini pendidikan menjadi faktor yang ampuh dalam melakukan perubahan yang lebih baik. Semakin baik pendidikan masyarakat maka

akan semakin tinggi juga partisipasi mereka dalam melakukan pengelolaan anggaran yang ada di dalam desa, masyarakat bisa berpartisipasi dalam menyumbang ide dan gagasan cemerlang mereka untuk melakukan perbaikan yang semakin baik.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, partisipasi masyarakat desa Klapanunggal dalam pengelolaan dana desa tahun 2022 masih tergolong rendah, meskipun pemerintah berupaya meningkatkannya. Meskipun beberapa program telah dilakukan, masyarakat masih terbatas dalam pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan manfaat. Meskipun terdapat tantangan, komitmen dan dedikasi masyarakat menunjukkan bahwa partisipasi publik kunci dalam pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien. Partisipasi aktif warga dapat meningkatkan efektivitas penggunaan dana desa, memperkuat hubungan warga dan pemerintahan, serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Proses partisipasi masyarakat harus melibatkan pengambilan keputusan, implementasi, evaluasi, dan merasakan dampak program kebijakan secara signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

Adam Latif, Irwan, Ahmad Mustanir. 2019.149. "Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Perencanaan Pembangunan." Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik.

- Adam Latif, Irwan, Ahmad Mustanir. 2019:149. "Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Perencanaan Pembangunan." Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik.
- Admin. 2020. Pengertian Demokrasi & Ciricirinya. November 2. Accessed Mei 5, 2023. <https://www.ilmuips.my.id>.
- Agusta, Oleh Ivanovich. 2003:1-2. "Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif." Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor.
- Ahmad Mustanir, Darmiah. 2016, 226-227. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN." Jurnal Politik Profetik.
- Alir, Diagram. 2005:22. "Metodelogi penelitian." repo.itera.ac.id.
- Andi Cudai Nur, Muhammad Guntur. 2019:16. Analisis Kebijakan Publik. Makassar: Universitas Negeri Makassar.
- Andi Uceng, Akhwan Ali, Ahmad Mustanir, Nirmawati. 2019:3. "Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Sumber Daya Manusia Di Desa Cemba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang." Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 3.
- Arnstein, Sherry R. 1969:216-224. "A Ladder of Citizen Participation." of the American Institute of planners.
- Bams. 2023:5. "Regulasi, Pengertian Menurut Ahlinya." All Right Reserved
- BAMS 2023. Februari 18. Accessed Mei 5, 2023. <https://bnp.jambiprov.go.id>.
- Barniat, Zulman. 2018:25-40. "Otonomi Desa: Konsep Teoritis dan Legal." Jurnal analisis sosial politik.
- BPK, RI. 2017. "Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik." JDIH BPK RI. January 1. Accessed Mei 5, 2023. <https://peraturan.bpk.go.id>.
- BPK-RI. 2014. UU NO 06 Tahun 2014 tentang desa. september 15. Accessed Mei 5, 2023. <https://peraturan.bpk.go.id>.
- Bungin, Burhan. 2011:106. Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikatif, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya. Jakarta: Kencana.
- Daraba, Dahyar. 2017:52-58. "Pengaruh Program Dana Desa Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat." <http://jurnal.unpad.ac.id>.
- Data, Analisis. 2014:12. "Teknik Pengumpulan Data." Jurnal Pendidikan MIPA, 12.
- Desa, Sistem Informasi. 2023. Dana Desa. Oktober 18. Accessed Oktober 19, 2023. <https://sid.kemendes.go.id>.
- Deti Kumalasari, Ikhsan Budi Riharjo. 2016.3. "TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA." Ilmu dan Riset Akuntansi.
- Deti Kumalasari, Ikhsan Budi Riharjo, 2016.3. "Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa." Ilmu dan Riset Akuntansi.
- Deti Kumalasari, Ikhsan Budi Riharjo, 2016:3. "Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa." Ilmu dan Riset Akuntansi.
- Dian Herdiana, Idah Wahidah, Neni Nuraeni, Annisa Nur Salam. 2021:2-3. "Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 di

- Kabupaten Sumedang: Isu dan Tantangan." JURNAL INSPIRASI. Dilahur. 2016:125-126. "Geografi desa dan pengertian Desa." journals.ums.ac.id.
- Diradimalata Kaehe, Joorie.M. Ruru, welson Y. Rompas. 2019:17. "Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kampung Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara." Jurnal Administrasi Publik.
- F, Ahmad Andrian. 2017. Portal Pendidikan. Juni Selasa. Accessed Mei 6, 2023. <https://keluhkesah.com>.
- Gramedia. 2021. Struktur Sosial di Masyarakat. january 5. <https://www.gramedia.com>.
- Habsy, Bakhrudin All. 2017: 90-100. "Seni memahami penelitian kuliatatif dalam bimbingan dan konseling." *Konseling Andi Matappa*.
- Hakim, Lukmanul. 2017:47. "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA SUKAMERTA KECAMATAN RAWAMERTA KABUPATEN KARAWANG." *Jurnal Politikom Indonesiana*.
- Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- . 2012:1-6. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Hidayat, Taufik. 2019:3. "PEMBAHASAN STUDI KASUS SEBAGAI BAGIAN METODOLOGI PENELITIAN." *Study Kasus*.
- Hisyam, Ciek Julyati. 2021:3. *Sistem Sosial Budaya Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Jamaludin, Adon Nasrullah. 2015:7. *Sosiologi Perdesaan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kartika, Ray Septianis. 2012:188. "Partisipasi masyarakat dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo." *Bina Praja*.
- Kartika, Ray Septianis. 2012:188. "Partisipasi masyarakat dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo." *Bina Praja*.
- Kartika, Ray Septianis. 2012:188. "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGELOLA ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA TEGESWETAN DAN DESA JANGKRIKAN KECAMATAN KEPIL KABUPATEN WONOSOBO." *Bina Praja*.
- Khuswatun Chasanah, Slamet Rosyadi, Denok Kurniasih. 2017:14. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA." *Journal of Public*.
- Kurnia, Ganjar. 2003:29. *Deskripsi Kesenian Jawa Barat*. Bandung: Kerjasama Dinas Kebudayaan & Pariwisata, Jawa Barat [dengan] Pusat Dinamika Pembangunan.
- Kurnia, Riyanti Sri. 2017:24-25. "Pengaruh pelaksanaan good governance terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam musrenbang di Kabupaten Bandung." *etheses.uinsgd.ac.id*.
- Kusmanto, Heri. 2014: 78-90. "Partisipasi Masyarakat dalam Demokasi Politik." *Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*.
- Kusmanto, Heri. 2014, 78-90. "Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi Politik." *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*.

- Laksana, Nuring Septyasa. 2013:61. "Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Desa dalam Program Desa Siaga Di Desa Bandung Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta." Kebijakan dan Manajemen Publik.
- Laksana, Nuring Septyasa. 2013:60. "Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat desa dalam program desa siaga di Desa Bandung, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta." kebijakan dan manajemen publik.
- Latifatul Izzah, Hendro Sumartono. 2017: 810. "Pengantar Ilmu Sejarah." repository.unej.ac.id. <https://repository.unej.ac.id>.
- Lubis, Asri. 2009:186-187. "Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan." TABULARASA PPS UNIMED.
- Lubis, Asri. 2009.1. "Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam pembangunan." Tabularasa.
- Lubis, Asri. 2009:1. "Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam pembangunan." Tabularasa.
- Lubis, Asri. 2009.181-182. "Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan." Tabularasa.
- Lubis, Asri. 2009.181-182. "Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan." Tabularasa.
- Lubis, Asri. 2009:181-182. "Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan." Tabularasa.
- Lubis, Asri. 2009:183-184. "UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN." JURNAL TABULARASA PPS UNIMED.
- Luthfy, Riza Multazam. 2021. "Politik Hukum Pengaturan Desa Dalam Produk Hukum." Legislasi Indonesia.
- Mahpuz, Khairil. 2022. DanaDesa: Pengertian, Tujuan, Serta Sumber dan Mekanisme Penyalurannya. Maret 16. Accessed Juli 24, 2023. <https://www.banjarsarilabuhanhaji.desa.id>.
- Mariana, Dede. 2015.216-228. "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan." Ilmu Pemerintahan.
- Mariana, Dede. 2015:216-228. "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan." Ilmu Pemerintahan.
- MR Akbar, M Mahmuddin, T Tripoli. 2021:169-175. "Analisis Biaya Pekerjaan Sloof Pada Proyek Pembangunan Gedung BPJN Aceh." of The Civil Engineering Student.
- Mseuno. 2020. "Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa." Wikipedia, Februari 16: 2.
- Mujib, Ahmad saiful. 2023. menuju desa berdaya melalui dana desa. februari 7. <https://www.masterplandes.com>.
- Murwani, Endah. 2017.50. "Literasi Budaya Partisipatif Penggunaan Media Baru pada Siswa SMA di DKI Jakarta." Ilmu Komunikasi.
- Nawawi, Hadari. 2001:11-12. "Manajemen sumber daya manusia." repo.iaintulungagung.ac.id, februari 15: 11-12.
- Nugroho, Riant. 2009: 11. Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- . 2009:11. Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- . 2009. Kebijakan Publik.

- . 2009:11. Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- NURWANDA, ASEP. 2018: 28-29. "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN FISIK (Studi Analisis Kebijakan Pemerintah Desa)." Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan.
- Rahadian, A. H. 2016:48-50. "Strategi pembangunan berkelanjutan." Prosiding Seminar STIAMI, februari 1.
- Rahardjo, Mudjia. 2011:1. Metode pengumpulan data penelitian kualitatif. Juni 9. Accessed Juli 22, 2023. <http://repository.uin-malang.ac.id>.
- . 2011:1. Metode pengumpulan data penelitian kualitatif. Juni 9. Accessed Juli 22, 2023. <http://repository.uinmalang.ac.id>.
- Rahim, Erman I. 2004:1-2. "PARTISIPASI DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK." Perspektif kebijakan publik.
- Rahmadi. 2011:92. Pengantar Metodologi Penelitian. Banjarmasin, Kalimantan Selatan: Antasari Press.
- . 2011:70-71. PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN. Banjarmasin, Kalimantan Selatan: Antasari Press.
- Rahman, Khairul. 2016:1. "Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa." Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi.
- Riadi, Muchlisin. 2020. Partisipasi Masyarakat (Prinsip, Jenis, Tingkatan dan Faktor yang Mempengaruhi). January 13. Accessed Mei 5, 2023. <https://www.kajianpustaka.com>.
- Ridwan, M. Kholil. 2023. KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN JUMLAH DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023. Februari 2. Accessed Desember 14, 2023. <https://lunangtiga.digitaldesa.id/berita/kebijakan-pengelolaan-dan-jumlah-danadesa-tahun-anggaran-2023>.
- Sajangbati, Youla C. 2015:25. "PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014." Lex Administratum.
- Sajangbati, Youla C. 2015:25-26. "PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014." Lex Administratum.
- Santoso, Lukman adi. 2023. buku pintar dana desa 2019. februari 7. <https://djpk.kemenkeu.go.id>.
- Soleh, Ahmad. 2017:35-36. "Strategi pengembangan potensi desa." Jurnal Sungkai.
- Sujarweni, V. W. 2014:32. "Metodologi penelitian." Yogyakarta: Pustaka Baru Perss.
- Sulaeman, Affan. 2015:12-24. "Demokrasi, Partai Politik Dan Pemilihan Kepala Daerah." Ilmu Pemerintahan.
- Sumarti, Titik. 2015:55-59. "INTERAKSI DAN STRUKTUR SOSIAL." Sosiologi Umum, Oktober 7, 2022.
- Suriansyah, Ahmad. 2011:2. Landasan Pendidikan. Banjarmasin: CodesKalimantan.
- Suyanto, Bagong. 1995:55. Perangkat kemiskinan: proble & strategi

- pengentasannya. Surabaya: Airlangga University Press.
- Syamsi, Syahrul. 2015:23. "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGONTROL PENGGUNAAN ANGGARAN DANA DESA." Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Thamrin, Djuni. 2017:64-83. "Membuka ruang baru demokrasi partisipatif bagi community policing: Peran forum warga." Keamanan Nasional.
- Triningsih, Anna. 2016:124-144. "Politik Hukum Pengujian Peraturan PerundangUndangan dalam Penyelenggaraan Negara." Konstitusi.
- Umar, Husein. 2013:30. "Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis." Rajawali Pers.
2014. "UU Desa No 6."
- Wahidmurni. 2017:4. Pemaparan metode penelitian kualitatif. Juli 4. Accessed November 28, 2023. <http://repository.uin-malang.ac.id>.
- Widoyoko, Eko Putro. 2009:5. Evaluasi program pembelajaran. Yogyakarta: pustaka pelajar.
- Wijaya, Arif. 2014. "Demokrasi Dalam Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia." HUKUM DAN PERUNDANGAN ISLAM.
- Yusanto, Yoki. 2019:3. "Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif." Scientific Communication.
- Zyad Rusdi, Dedi Trisnawarman. 2018:172. "Rekayasa Perangkat Lunak Sistem Monitoring Dan Evaluasi Program Pembangunan Desa." Computer Science and Information Systems.